

---

## **Analisis Urgensi Proses Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia**

---

**INFO PENULIS    INFO ARTIKEL**

Aprilia Putri Hapsari    ISSN: 2807-7474  
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta    Vol. 2, No. 2, Agustus 2022  
[aprilial1900031078@webmail.uad.ac.id](mailto:aprilial1900031078@webmail.uad.ac.id)    <http://jurnal-unsultra.ac.id/index.php/seduj>

Farid Setiawan  
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  
[farid.setiawan@pai.uad.ac.id](mailto:farid.setiawan@pai.uad.ac.id)

Santi Mahmuda Urbaningkrum\*  
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  
[aprilial1900031078@webmail.uad.ac.id](mailto:aprilial1900031078@webmail.uad.ac.id)\*

Umi Rahmawati  
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  
[umi1900031058@webmail.uad.ac.id](mailto:umi1900031058@webmail.uad.ac.id)

Mutiara Afifah  
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  
[mutiara1900031084@webmail.uad.ac.id](mailto:mutiara1900031084@webmail.uad.ac.id)

Faniya Nurul Rohmah  
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta  
[faniya2000031061@webmail.uad.ac.id](mailto:faniya2000031061@webmail.uad.ac.id)

© 2022 Unsultra All rights reserved

---

***Saran Penulisan Referensi:***

Hapsari, A. P., Setiawan, F., Urbaningkrum, S. M., Rahmawati, U., Afifah, M., & Rohmah, F. N. (2022). Analisis Urgensi Proses Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Sultra Educational Journal*, 2 (2), 67-77.

---

### Abstrak

Salah satu harapan bangsa terhadap Pendidikan di Indonesia yaitu tercapainya Pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Dalam rangka mewujudkan cita-cita itu maka ada hal yang harus diperhatikan dalam operasi sistem Pendidikan. Salah satunya adalah Kebijakan Pendidikan yang menjadi hal penting dalam sistem Pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan Pendidikan tentunya terlebih dahulu melewati tahap-tahap mulai dari pembuatan rancangan atau rumusan, pengambilan keputusan, sosialisasi kepada masyarakat, sampai pada pelaksanaan. Tentunya dalam proses kebijakan Pendidikan diperlukan adanya pengakuan atau pengesahan agar kebijakan yang dilaksanakan memiliki legalitas yang resmi. Kebijakan Pendidikan yang akan dilaksanakan harus diketahui dan dipahami oleh seluruh komponen kebijakan Pendidikan hingga ke masyarakat sehingga diperlukan komunikasi kebijakan Pendidikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang legitimasi dan komunikasi kebijakan Pendidikan, bagaimana prosesnya, apa saja problematikan dan strategi penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mendekaat studi kepustakaan yakni mengumpulkan data dan menelaahnya berbagai macam sumber referensi atau literatur yang meliputi buku, majalah, dokumen, catatan, jurnal dan sebagainya. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil mengenai konsep dan problematika legitimasi dan komunikasi kebijakan Pendidikan secara utuh.

**Kata Kunci:** Kebijakan Pendidikan, Legitimasi, Komunikasi Kebijakan Pendidikan

### Abstract

One of the nation's hopes for education in Indonesia is the achievement of quality and quality education. In order to realize these ideals, there are things that must be considered in the operation of the education system. One of them is the Education Policy which is an important thing in the education system in Indonesia. The implementation of education policies must first go through stages starting from making a design or formulation, making decisions, socializing to the community, to implementation. Of course, in the education policy process, it is necessary to acknowledge or ratify so that the policies implemented have official legality. Education policies that will be implemented must be known and understood by all components of education policies to the community so that education policy communication is needed. The purpose of this research is to find out about the legitimacy and communication of education policies, how the process is, what are the problems and strategies for solving them. The method used in this study is a qualitative method by approaching a literature study, namely collecting data and examining various kinds of reference sources or literature which include books, magazines, documents, notes, journals and so on. From the research conducted, the results obtained regarding the concept of legitimacy and communication of education policies as a whole.

**Keywords:** Education Police, Legitimacy, Communication of Education Policies

## A. Pendahuluan

Salah satu harapan bangsa ini adalah menjadikan Pendidikan berkualitas dan bermutu sehingga mampu mengembangkan kemampuan dan keterampilan generasi bangsa yang relevan dengan sumebr daya yang dapat diolahnya. Pendidikan mejadi salah satu alat yang digunakan dalam pengembangan sumber daya manusia di Indonesia sehingga sistem yang dijalankan pun memerlukan regulasi dan kebijakan. Apalagi di era 5.0 dan globalisasi kebijakan Pendidikan yang dibuat haruslah sesuai dengan situasi dan kondisi yan terjadi. Kebijakan sendiri memiliki arti suatu proses dari perencanaan dan perumusan berupa aturan ataupun program yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi (Yanti, 2020). Kebijakan ini dibuat oleh suatu Lembaga atau instansi pemerintah yang telah diberikan hak dan wewenang baik sebagai pembuat keputusan, pembuat rencana dan rumusan, pelaksana kebijakan, bahkan

masyarakat. Kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada bidang Pendidikan (Solichin, 2015). Kebijakan terlebih dahulu direncanakan kemudian direncanakan oleh pihak pembuat rencana dan rumusan kebijakan, kemudian diajukan kepada para pembuat keputusan serta khalayak umum. Setelah diputuskan maka kebijakan akan dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan Pendidikan.

Namun, sebelum dilaksanakan sebuah kebijakan perlu sebuah legalisasi atau pengesahan sehingga kebijakan yang ditetapkan memiliki pengesahan yang resmi dalam undang-undang maupun hukum di Indonesia serta masyarakat. Tahap- tahap yang dilakukan dalam kebijakan pendidikan tentunya tak terlepas dengan yang namanya komunikasi. Komunikasi kebijakan Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan pendidikan. Komunikasi dilakukan diseluruh komponen yang ada dalam proses kebijakan pendidikan mulai dari pembuat rencana dan rumusan kebijakan, pembuat keputusan, pelaksana kebijakan, dan masyarakat (khalayak umum). Komunikasi dilakukan agar dalam proses kebijakan pendidikan semua komponen terutama masyarakat dapat memahami dengan baik tujuan dari dilaksanakan kebijakan tersebut. Berdasarkan beberapa penjelasan diatas tentu tak akan lepas dari yang terjadinya problematika baik yang disebabkan dari partisipan, sarana prasarana, dan sebagainya. Oleh karena itu, penulis sepakat untuk membahas tentang problematika legitimasi dan komunikasi kebijakan Pendidikan di Indonesia. Penulis membahas tentang apa itu legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan, bagaimana proses legitimasi dan komunikasi kebijakan pendidikan, serta apa saja problemnya dan bagaimana strategi penyelesaiannya.

## B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yakni mengumpulkan data dan menelaahnya berbagai macam sumber referensi atau literatur yang meliputi buku, majalah, dokumen, catatan, jurnal dan sebagainya (Mirzaqon, 2018). Sumber referensi yang digunakan berkaitan dengan legitimasi dan komunikasi kebijakan Pendidikan. Penelitian ini dalam Teknik pengambilan data menggunakan Teknik searching yakni mengambil referensi diinternet agar dapat lebih mudah menelaah informasi dan data yang didapatkan. Informasi yang didapat kemudian diolah dan dianalisis sehingga mendapatkan hasil dan kesimpulan diakhir penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan cara pengumpulan data studi pustaka. Data yang ditemukan kemudian diolah dan dianalisis sehingga menghasilkan rangkaian penjelasan tentang "Problematika Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia".

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Legitimasi Kebijakan Pendidikan

#### a. Pengertian Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Istilah legitimasi berasal dari bahasa latin *lex* yang mengandung makna "hukum". Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keterangan atau pernyataan yang sah menurut undang-undang. Selain itu, beberapa ahli bidang politik juga menjelaskan makna legitimasi dari sudut pandangnya masing-masing. Pertama, menurut Zimmerman dan Zeitz mengemukakan bahwa legitimasi merupakan penerimaan oleh masyarakat terhadap suatu hal, Penerimaan tersebut dapat ditandai dengan penilaian sosial (Irawan, 2014). Adapun menurut Silalahi sebagaimana dikutip oleh Ali Imron, legitimasi berasal dari bahasa Inggris *legitimacy* yang memiliki arti memberi kewenangan pada suatu sistem politik (Imron, 2012).

Selanjutnya terkait kebijakan pendidikan, secara bahasa kebijakan memiliki arti serangkaian konsep dan asas yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Jika disambungkan dengan bidang pendidikan, maka kebijakan pendidikan memiliki batasan khusus untuk bidang pendidikan itu sendiri. Carte V. Good dalam memaknai kebijakan pendidikan sebagai suatu penilaian yang mencakup aspek sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai (Tawa, n.d.).

Meninjau keterkaitan kata legitimasi dan kebijakan pendidikan baik secara etimologi dan terminologi tentu saja legitimasi tidak dapat dipisahkan dengan suatu

kebijakan yang mengandung aturan mengikat beserta rambu-rambu pelaksanaannya. Kaitannya dengan kebijakan pendidikan, legitimasi merupakan satu dari sekian proses pengadaan kebijakan di bidang pendidikan. Legitimasi kebijakan pendidikan merupakan proses dimana suatu kebijakan disahkan, artinya kebijakan tersebut telah memiliki pengakuan resmi di mata hukum perundang-undangan yang berlaku khususnya di Indonesia. Dengan adanya legitimasi kebijakan pendidikan, maka suatu kebijakan dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis dan dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait baik dari tingkat pusat, daerah, hingga pada unit-unit lembaga pendidikan dengan berbagai tingkatan.

b. Urgensi dan Manfaat Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Legitimasi merupakan gerbang awal pelaksanaan kebijakan baru. Dengan selesainya tahap legitimasi maka suatu kebijakan dinilai mampu dan pantas dilaksanakan dalam spektrum yang luas. Oleh karena itu, tahapan legitimasi menjadi bagian yang sangat penting dan memerlukan perhatian lebih. Berikut urgensi legitimasi kebijakan pendidikan ditinjau dari manfaatnya:

- 1) Legitimasi menghantarkan pada otorisasi. (Sudrajat, n.d.) Jika ditinjau dari ranah pendidikan, maka manfaat dari legitimasi yang pertama adalah memberi kuasa atau kewenangan bagi para pemimpin pendidikan dan praktisi pendidikan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan yang berpegang pada suatu kebijakan berlaku.
- 2) Menghadirkan kestabilan politik dan perubahan social. Dengan terlegitimasinya suatu kebijakan baru, tentu kebijakan tersebut dinilai mampu menjawab persoalan yang ada. Keabsahan kebijakan yang telah dijamin tersebut itu memberikan control social sehingga gejolak perubahan dapat diminimalisir.
- 3) Mengatasi masalah lebih cepat. Legitimasi menjembatani proses pengendalian masalah melalui pengesahan kebijakan baru secara sistematis dan tepat guna, sehingga kebijakan baru tersebut dapat segera diimplementasikan secara legal guna mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Tanpa adanya legitimasi, maka kebijakan baru mutahil untuk diimplementasikan dengan bijaksana, pasalnya kebijakan tersebut belum memiliki pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat yang diwakilkan pada pihak yang berwajib.

c. Proses Legitimasi Kebijakan Pendidikan

Legitimasi adalah keputusan yang dibuat oleh pemimpin dan pejabat pemerintah atas dasar bahwa pemimpin memperoleh dan menjalankan kekuasaan sesuai dengan nilai-nilai proses publik dan standar politik atau etika. Ini adalah prinsip yang menunjukkan bahwa masyarakat menerimanya. Legitimasi dianggap penting bagi para pemimpin pemerintahan karena di semua sistem politik mereka berusaha untuk mendapatkan atau mempertahankannya. Dengan legitimasi, pemimpin dapat membawa pada stabilitas politik, memfasilitasi perubahan sosial, memperluas ranah kesejahteraan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup yang bermanfaat. Legitimasi juga merupakan konsep yang menciptakan hubungan antara pemimpin dan pengikut (Nahartyo, 2016).

Legitimasi dapat dimaknai secara luas dan sempit sebagai dukungan publik terhadap sistem politik dalam arti luas dan dukungan publik terhadap pemerintah yang otoritatif dalam arti sempit. Ada hubungan erat antara kekuatan normatif dan kualitas individu dengan legitimasi. Legitimasi juga merupakan tindakan atau peraturan hukum yang ada, seperti hukum formal, hukum etnis, hukum moral, atau hukum masyarakat yang sudah mapan. Oleh karena itu, jika pemimpin memegang suatu jabatan dan memiliki kekuasaan yang sah, maka legitimasi kekuasaan berarti dibenarkan bahwa orang yang bersangkutan memegang jabatan itu dan menjalankan kekuasaannya adalah sah (Kumala, Setiawan, Munauwarah, Wulandari, & Tramidzi, 2021).

Kebijakan pendidikan dapat digolongkan ke dalam kebijakan pendidikan umum yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembangunan berbangsa dan bernegara di bidang pendidikan. Pada hakikatnya kebijakan pendidikan adalah keputusan yang isinya adalah tujuan, prinsip dan aturan. Format kebijakan biasanya didokumentasikan dan dibuat untuk dipandu oleh manajemen organisasi, karyawan,

personel, dan interaksi dengan lingkungan eksternal. Bentuk kebijakan pendidikan ini biasanya berupa undang-undang pendidikan terkait pendidikan, pedoman, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya. Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan promotor yang bertanggung jawab atas pembangunan negara dan yang dapat membangun negara sendiri (Aziz, et al., 2020).

Setelah suatu kebijakan berhasil dirumuskan dan sebelum dapat diterapkan pada masyarakat, maka kebijakan tersebut harus memiliki legitimasi atau kekuatan hukum untuk mengontrol pelaksanaannya di masyarakat. Legitimasi penting karena mempengaruhi banyak orang, bermanfaat bagi sebagian orang, dan merugikan kelompok lain. Selain itu, semua kebijakan yang mempengaruhi anggaran harus diumumkan oleh pemerintah. Secara umum, hak untuk melegalkan adalah hak milik pemerintah atau legislatif. Namun jika ditelaah lebih dekat, tingkat legitimasi pemerintah sangat bergantung pada dukungan pemerintah dan masyarakat, sehingga tidak mungkin memisahkan proses legalisasi dari hubungan secara nasional sebagai sumber utama legitimasi, baik untuk pemerintah dan apa yang ingin didapat dari masyarakat (Elih Yuliah, 20120).

Pada hakikatnya, analisis kebijakan mencakup hasil pengetahuan tentang proses kebijakan. Secara historis, tujuan analisis kebijakan adalah untuk menyediakan informasi bagi pembuat kebijakan yang dapat digunakan sebagai sumber refleksi yang masuk akal untuk menemukan solusi terhadap masalah kebijakan (Fatkuroji, 2016). Metode untuk mencapai dan mempertahankan legitimasi dapat dibagi menjadi tiga kelompok:

- 1) Dengan mengutamakan kepercayaan pada masyarakat secara simbolik, yaitu berupa simbol-simbol seperti akhlak yang baik, nilai budaya dan penghormatan terhadap tradisi. Misalnya; Ritual kenegaraan, pertunjukan wayang, identifikasi diri dengan mayoritas (seperti agama tertentu) adalah beberapa contoh penggunaan simbol ritual.
- 2) Materi rakyat, seperti tata cara: pendidikan dan fasilitas kesehatan yang lebih baik, kesempatan kerja yang lebih banyak, ketersediaan pangan yang dibutuhkan masyarakat, industri sarana pertanian, sarana telekomunikasi dan transportasi, dan janji permodalan yang cukup.
- 3) Dengan mengadakan pemilihan umum dan mengangkat pejabat terpilih, perdana menteri, presiden, dan lainnya. Keanggotaan lembaga pendidikan tinggi atau referendum untuk mengadopsi kebijakan bersama.

Dari interpretasi di atas, dapat disimpulkan bahwa legitimasi kebijakan diperoleh secara simbolis, prosedural dan material melalui bentuk-bentuk pembenaran tradisional, ideologi kualitas individu, prosedur dan sarana. Jika proses politik pasca legisasi adalah penyerahan perbaikan dan legitimasi sebagai keputusan akhir kebijakan. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik tertentu yaitu:

- 1) Menetapkan Tujuan Pendidikan. Kebijakan pendidikan perlu menetapkan tujuan. Lebih tepatnya, kita perlu menetapkan tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk berkontribusi pada pendidikan.
- 2) Kesesuaian dengan aspek hukum formal. Kebijakan Pendidikan harus diakui dan memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat diterapkan secara hukum di wilayah tersebut, saat Kebijakan Pendidikan ditegakkan. Oleh karena itu, dalam kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional yang berlaku di daerah agar sah dan resmi berlaku di daerah. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk mengusulkan kebijakan pendidikan yang sah.
- 3) Adanya konsep operasional. Kebijakan pendidikan sebagai pedoman umum harus memiliki manfaat operasional untuk dilaksanakan, yang penting untuk menunjukkan pencapaian tujuan pendidikan yang dicapai. Selain itu, perlunya kebijakan Pendidikan sebagai pendukung pengambilan kebijakan.
- 4) Kebijakan pendidikan yang diambil oleh otoritas yang berwenang. Kebijakan tersebut harus dirancang dan diberdayakan oleh para ahli di bidangnya agar tidak merugikan lingkungan pendidikan dan non-pendidikan. Manajer pendidikan, manajer institusi, dan politisi yang terlibat langsung dalam pendidikan adalah elemen minimum dari pembuat kebijakan pendidikan.

- 5) Kebijakan dapat dievaluasi. Kebijakan pendidikan tentunya tidak bisa lepas dari situasi riil yang perlu ditindak lanjut. Jika sudah baik harus dipertahankan atau dikembangkan lebih lanjut, dan jika terdapat kesalahan harus diperbaiki. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang dipersonalisasi dapat memungkinkan penilaian yang mudah dan efektif.
- 6) Sistematis. Kebijakan pendidikan, tentu saja, adalah sebuah sistem, jadi kita perlu mengambil pendekatan yang jelas dan sistematis untuk semua aspek yang kita coba atur. Juga, sistem harus sangat efektif, efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak praktis, diskriminatif atau rentan secara struktural karena banyak elemen yang hilang atau kontradiktif. Hal ini harus diperhatikan dengan seksama agar penerapannya tidak menimbulkan cacat hukum internal. Kedua, kebijakan pendidikan harus diintegrasikan secara eksternal ke dalam bidang kebijakan lainnya. Politik politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atas atau di samping dan di bawah (M. E. Anwar, 2014).

d. Problematika Legitimasi Kebijakan Pendidikan dan Strategi Penyelesaiannya

Terdapat beberapa problematika yang terjadi pada legitimasi kebijakan pendidikan, menurut Abd. Madjid diantaranya yaitu:

- 1) Adanya penolakan dari pelaksana rencana sebelumnya yang sudah tidak ada lagi. Ada perlawanan dari eks aktor kebijakan yang bukan lagi aktor. Akibatnya, para eks aktor kebijakan masih cenderung menganggap apa yang dirumuskan dan dilaksanakan dapat bertahan sampai saat ini (Setiawan, dkk., 2021).
- 2) Ada kebijakan yang baru dikembangkan melawan oposisi dari kelompok konservatif. Hal ini terjadi ketika kebijakan yang dirumuskan berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang dianggap tradisional. Secara umum, sangat sulit untuk mengubah sesuatu yang tradisional. Butuh waktu lama untuk mengubah masyarakat yang konservatif. Contohnya yaitu program *Full Day School* (FDS), kebijakan program FDS yang dirancang Kementerian Kebudayaan itu menuai kritik tajam dari sejumlah elite. Hal ini, elit juga memiliki hubungan kekuasaan yang matang untuk kepentingan politik penguasa (Ariandy, 2019).
- 3) Akibat dari oposisi dari kelompok konservatif dan mantan aktor politik yang bukan lagi aktor, para pengikut ini biasanya cenderung mengikuti gerak-gerik dan tata cara pemimpinnya. Maka dari itu, proses legitimasi terhambat.
- 4) Ada berbagai formulasi dari kelompok yang memiliki visi, pengakuan, kepentingan perumus dan legitimasi. Kelompok resistensi umumnya sulit untuk dikompromikan. Jika mereka tidak dikonfirmasi, legitimasi perlu mendekati kelompok tersebut sehingga mereka dapat bersama untuk mendukung kebijakan yang direncanakan (Madjid, 2018).
- 5) Pengambil keputusan kebijakan pendidikan kekurangan pengetahuan, informasi, dan isu pendidikan, baik secara konseptual maupun kontentis (Saif, 2017). Dikatakan bahwa pada masa pemerintahan orde baru, banyak kebijakan yang tidak dirumuskan melalui proses yang adil seperti biasanya. Perkembangan kebijakan tidak melalui proses akumulasi, sirkulasi, dan adaptasi yang normal. Perumusan kebijakan publik yang dilakukan dengan cara yang tidak melalui proses politik rasional yang biasa, menghadapi persoalan legitimasi. Isu legitimasi terletak pada penolakan publik terhadap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah, dan akibatnya keputusan kebijakan tidak mendapat dukungan (ilegal). Pada umumnya orang yang tidak terlibat dalam suatu rencana kebijakan atau tidak diajak berdiskusi dan terlibat dalam proses pembangunan biasanya cenderung pasif menerima bahkan menolaknya.

Adanya problematika di atas, maka sangat diperlukan upaya untuk memperbaiki problematika yang ada. Berikut ini beberapa yang dapat dijadikan solusi, diantaranya adalah:

- 1) Adanya keterbukaan ruang publik sebagai sarana diskusi terbuka. Hal ini membantu mempermudah dalam menyiapkan sarana diskusi dengan masyarakat untuk mengkomunikasikan kebijakan baru dari pembuat kebijakan, dengan begitu masyarakat umum akan memiliki cara untuk memahaminya secara lebih detail.

- 2) Adanya komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan masyarakat umum. Ada komunikasi antara dua pihak ini antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Setelah komunikasi dua arah, serta komunikasi satu arah terjalin, masyarakat dan pembuat kebijakan dapat saling memahami kondisi keduanya.
- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Masyarakat menjadi sadar bisa ikut aktif bukannya pasif dengan perumusan kebijakan yang ada sehingga mereka tidak merasa bahwa setelah kebijakan itu ada mereka baru menyesali karena tidak berkontribusi dalam perumusan kebijakan.
- 4) Perlunya media komunikasi dalam penyebaran informasi Pendidikan. Hadirnya informasi edukasi yang mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah, sehingga tidak hanya berita hoax yang berdampak pada kebijakan baru, tetapi juga bagaimana pembuat kebijakan menciptakan pembuat kebijakan yang baik.

## 2. Komunikasi Kebijakan Pendidikan

### a. Pengertian Komunikasi Kebijakan Pendidikan

Komunikasi dapat diartikan baik secara bahasa maupun secara istilah. Secara bahasa, komunikasi atau dalam bahasa inggrisnya communication yang berasal dari bahasa latin yaitu communis yang artinya 'sama', communicario dan communicare yang artinya 'membuat sama'. Istilah yang paling sering digunakan untuk asal usul dari komunikasi adalah communis karena kata-kata lainnya merupakan turunan kata dari communis dan memiliki padanan makna. Menurut Mulyana (2005), komunikasi memberikan saran bahwasannya suatu pikiran, makna, atau pesan dianut secara sama. Kemudian, secara istilah komunikasi merupakan proses yang mana partisipan didalamnya saling bertukar tanda-tanda informasi dalam satu waktu. Tanda-tanda informasi dapat dibagi menjadi verbal, nonverbal, dan paralinguistic. Tanda-tanda verbal dapat berupa angka dan kata yang ditulis atau diucapkan. Tanda-tanda nonverbal yaitu berupa gerakan tubuh, warna, waktu, ruang, music, pakaian, bau, dan elspresi fasial. Sedangkan tanda-tanda paralinguistic dapat berupa tekanan suara, kecepatan bicara, vokalisasi, kualitas suara yang digunakan dalam menunjukkan suatu emosi tertentu (Dr. Abd. Majid, 2018).

Komunikasi kebijakan Pendidikan merupakan sebuah proses sosialisasi atau penyampaian ide, gagasan, atau informasi mengenai rumusan kebijakan Pendidikan yang telah selesai dilegitimasi. Komunikator disini merupakan actor perumusan kebijakan Pendidikan, sedangkan yang menjadi komunikannya adalah masyarakat dan para pelaksana kebijakan Pendidikan beserta perangkat-perangkatnya. Bahan yang dikomunikasikan adalah rumusan kebijakan yang meliputi consider, isi, dan penjelasannya. Kemudian, pelaksana kebijakan dan perangkatnya mengkomunikasikan lagi kebijakan Pendidikan tersebut kepada masyarakat. Setelah itu, rumusan kebijakan Pendidikan ini akan dikomunikasi lagi oleh masyarakat dengan masyarakat lainnya sehingga rumusan kebijakan tersebut masuk menjadi bagian dari masyarakat (Majid, 2018).

### b. Alasan Pentingnya Komunikasi Kebijakan Pendidikan

Seperti yang telah disebutkan yang mana komunikasi kebijakan Pendidikan merupakan proses sosialisasi atau penyampaian informasi terkait dengan kebijakan Pendidikan. Maka dari itu, ada beberapa alasan pentingnya komunikasi dalam kebijakan Pendidikan, yang dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Agar Komunikasikan (Para Pelaksana Kebijakan dan Masyarakat) Mampu Memahami Lebih dalam Tentang Rumusan Kebijakan Pendidikan

Sebuah rumusan kebijakan seringkali mendapatkan penolakan dari masyarakat dengan berbagai alasan salah satunya kurang aspiratif terhadap situasi terkini padahal penolakan tersebut terjadi karena masyarakat belum memahami rumusan kebijakan Pendidikan secara lebih mendalam lagi. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan Pendidikan harus terus menerus dilakukan agar dapat dipahami lebih dalam lagi oleh masyarakat (Farid Setiawan, Rahmadin Munauwarah, Ani Wulandari, Nur Aini Dewi, 2021).

- 2) Agar tidak terjadi Kesalahpahaman Mengenai Rumusan Kebijakan Pendidikan

Komunikasi ini perlu dilakukan secara berkelanjutan mengingat bahwa yang disampaikan oleh komunikator belum tentu dipahami secara utuh oleh

komunikasikan. Kesalahpahaman ini yang sering menjadi penyebab tidak tersosialisasikan dengan baik suatu rumusan kebijakan Pendidikan. Maka perlu terus dilakukan komunikasi agar kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat dapat terluruskan dan masyarakat mulai memahami rumusan kebijakan Pendidikan yang ditetapkan (Rusdiana, 2021).

c. Fungsi dan Peran Komunikasi Kebijakan Pendidikan

Adapun 4 fungsi yang dimiliki oleh komunikasi kebijakan Pendidikan yaitu sebagai berikut:

- 1) Fungsi komunikasi terhadap para pembuat keputusan yang mana digunakan dalam penyampaian usulan alternatif kebijakan serta meyakinkan para pembuat keputusan bahwa kebijakan yang diusulkan realistis dan dapat diterima (Majid, 2018).
- 2) Fungsi komunikasi terhadap para perencana dan pengelola dalam pelaksanaan kebijakan yang mana digunakan untuk meyakinkan bahwa kebijakan sudah diuji realistis atau tidaknya. Selain itu, juga digunakan dalam menciptakan kesinambungan antara keputusan yang diambil dengan penjabaran kebijakan dalam perencanaan dan pengelolanya. Keyakinan dari para perencana dan pengelola juga dapat mempengaruhi para pembuat keputusan karena pertimbangan yang dipakai oleh perencana dan pengelola lebih ke segi operasional yaitu bagaimana nantinya kebijakan dituangkan dengan menyesuaikan ruang, waktu, tempat, serta cara pelaksanaannya.
- 3) Fungsi komunikasi terhadap para pelaksana kebijakan yang dilakukan agar pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan dilapangan dapat mengetahui tujuan utama dari yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan. Selain itu, komunikasi disini dilakukan agar bertambahnya wawasan mengenai hal-hal yang harus mereka lakukan setiap hari nantinya. Wawasan luas yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan ini diharapkan dapat memperkecil distorsi yang terjadi antara konsep dan tujuan dari sebuah kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan dilapangan.
- 4) Fungsi komunikasi terhadap masyarakat yang mana digunakan agar masyarakat mengetahui secara mendalam tentang rumusan kebijakan Pendidikan serta menimbulkan pemikiran bahwasannya pembuat keputusan merupakan pelaksana aspirasi masyarakat. Penting untuk selalu konsisten terhadap pemikiran ini agar masyarakat senantiasa mendukung dan berpartisipasi secara aktif.

Komunikasi kebijakan Pendidikan juga memiliki peran penting utamanya dalam pelaksanaan kebijakan karena melalui komunikasi dapat meningkatkan pemahaman mengenai rumusan kebijakan Pendidikan. Komunikasi dapat efektif ketika informasi yang disampaikan sudah komunikatif dengan didukung sumber yang kuat, media yang representatif, serta pesan yang jelas (Supriadi, 2011). Komunikasi kebijakan Pendidikan juga berperan dalam mencapai efektivitas kebijakan baik internal birokrasi maupun pembinaan hubungan kemitraan dengan masyarakat. Komunikasi yang terbuka dapat meningkatkan kepercayaan public terhadap kebijakan yang diimplementasikan (Nani, 2021).

d. Model Komunikasi Kebijakan Pendidikan

1) Model Komunikasi Satu Arah

Model komunikasi satu arah ini dapat disebut juga dengan komunikasi aksi atau *top down* (arah komunikasi dari atas ke bawah). Komunikasi ini terjadi secara sepihak yang mana komunikatornya adalah pembuat kebijakan sedangkan komunikannya adalah pembuat kebijakan dan masyarakat. Pada model komunikasi satu arah ini pembuat kebijakan merupakan sumber pesan sedangkan pelaksana kebijakan dan masyarakat merupakan penerimanya. Ditilik lebih lanjut pelaksana kebijakan menjadi komunikator dan masyarakat menjadi komunikannya. Wilbur Schraumn mengatakan bahwa dalam komunikasi pengalaman memiliki peran penting, dengan pengalaman dapat ditentukan pesan yang disampaikan oleh pengirim diterima dengan baik dan sesuai oleh penerima (Rusdiana, 2021).

2) Model Komunikasi Dua Arah

Model komunikasi dua arah ini sering disebut dengan komunikasi interaksi. Komunikasi ini memiliki dua arah yaitu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Komunikasi ini terjadi dengan kebutuhan yang sama antara perumus kebijakan sebagai komunikator dan pelaksana kebijakan sebagai komunikan, serta kebutuhan yang sama juga dengan pelaksana kebijakan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan. Komunikasi dua arah ini juga dapat diartikan sebagai komunikasi yang konsultatif yang mana komunikator dan komunikan berkontribusi secara seimbang.

### 3) Model Komunikasi Multiarah

Model komunikasi multi arah ini disebut juga dengan istilah komunikasi transaksi. Komunikasi multi arah ini dalam aliran pesannya bukan hanya dari komunikator ke komunikan saja tapi sebaliknya dari komunikan ke komunikator. Oleh karena itu, baik komunikator maupun komunikan sama-sama berkontribusi secara seimbang dalam proses komunikasi. Pada komunikasi multi arah ini seluruh komponen komunikasi berpartisipasi secara aktif sehingga rumusan kebijakan Pendidikan dapat dipahami secara utuh dan sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut.

Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi kebijakan Pendidikan yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi (K. Anwar & Ayudya, 2015).

### e. Problematika Komunikasi Kebijakan Pendidikan dan Strategi Penyelesaiannya

Kebijakan pendidikan merupakan rumusan putusan suatu institusi yang ditetapkan sebagai suatu solusi atau tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi (Mayangsari et al., 2019). Dimana kebijakan merupakan pedoman dan juga suatu inovasi bagi institusi untuk mencapai visi dan misi pendidikan. Dalam pembentukan kebijakan tentulah tidak semudah membalikkan tangan. Ada problematika-problematika yang terjadi, termasuk problematika komunikasi. Problematika komunikasi kebijakan pendidikan yang mungkin terjadi antara lain:

- 1) Problematika yang timbul karena faktor komunikator
  - a) Pesan yang tidak tersampaikan dengan jelas, hal ini disebabkan karena komunikator tidak ahli dalam menyampaikan pesan. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan tidak tersampaikan dengan baik (Hartika, 2017).
  - b) Referensi yang digunakan oleh komunikator dengan komunikan berbeda. Dimana hal ini menjadi penyebab tidak tepatnya penyampaian kebijakan pendidikan oleh komunikator.
  - c) Kredibilitas komunikator yang kurang di mata komunikan, salah satunya adalah ketokohan seorang komunikator di mata masyarakat. Hal tersebut mampu mempengaruhi tingkat kepercayaan komunikan terhadap komunikator.
- 2) Problematika yang timbul karena faktor komunikan.
  - a) Heterogenitas komunikan. Perbedaan etnik, budaya serta tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu penyebab terbentuknya masyarakat yang heterogen. Adanya perbedaan inilah yang menjadi tantangan tersendiri bagi seorang komunikator dalam menentukan bahasa yang digunakan.
  - b) Komunikan yang salah memahami pesan. Apabila hal ini terjadi maka akan terjadi kesalahpahaman serta problem antara masyarakat dengan institusi terkait. Oleh karenanya pemahaman yang seragam diperlukan dalam komunikasi kebijakan pendidikan.
- 3) Problematika yang timbul karena faktor pesan itu sendiri.
  - a) Ketidakjelasan rumusan kebijakan yang ada. Sehingga kebijakan susah dipahami oleh penerima pesan (masyarakat) serta rawan kesalahpahaman.
  - b) Rumusan kebijakan yang dianggap asing. Masyarakat cenderung mudah menerima hal-hal yang telah mereka kenal atau familiar bagi mereka. Kebijakan yang dianggap asing akan memiliki peluang penolakan yang lebih tinggi dibanding dengan kebijakan yang telah familiar.
  - c) Kebijakan yang terlampau ideal serta tidak realistis akan dianggap sekadar omong kosong oleh komunikan. Sehingga komunikan akan cenderung apatis dalam menanggapi kebijakan tersebut.

Lembaga pendidikan islam tentulah mengusahakan pengelolaan lembaga dengan input pendidikan yang menjadikan manusia terdidik sebagai output dari proses Pendidikan (Royani et al., 2019). Dari pengelolaan inilah akan dikeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendorong proses pengelolaan. Sehingga dengan adanya problematika-problematika di atas haruslah terdapat solusi untuk mengatasinya.

Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif. Dimana komunikasi dinilai akan lebih efektif apabila memperhatikan beberapa hal berikut:

- 1) Hendaknya sasaran komunikasi telah diketahui dengan pasti, sehingga dapat menyesuaikan komunikatornya agar pesan-pesan yang hendak disampaikan nantinya tersampaikan dengan baik.
- 2) Mengusahakan agar jarak antara komunikan dan komunikator tidaklah terlalu jauh. Agar nantinya tidak terjadi perbedaan yang signifikan antara komunikator dan komunikan. Seperti halnya untuk mengkomunikasikan suatu kebijakan untuk siswa milenial sebaiknya penyampaiannya dilakukan oleh guru atau komunikator yang milenial atau paham generasi milenial. Sehingga nantinya kebijakan dapat tersampaikan secara baik.
- 3) Sumber komunikasi haruslah terpercaya, oleh karenanya komunikator haruslah orang yang telah memiliki kompetensi. Sehingga komunikan menilai bahwa komunikator adalah orang yang memiliki kredibilitas yang bagus.
- 4) Pada saat penyampaian pesan, haruslah dilakukan secara langsung, sekligus, dan tidak diselingi dengan hal lain. Agar pesan tersampaikan secara lengkap dan tuntas.
- 5) Sumber komunikasi haruslah jelas dan tidak rancu (Napitupulu, 2019).

Komunikasi yang efektif akan terlihat pada pelayanan pihak manajemen sekolah, kualitas, dan keunggulan lulusan. Hal ini sebagaimana harapan *stakeholders* sehingga ketrampilan komunikasi personil-personil sekolah haruslah selalu ditingkatkan. Agar nantinya dapat mendukung terwujud dan tercapainya tujuan pendidikan di lembaga Pendidikan (Wahyuningtyas & Sulasmono, 2020).

#### D. Kesimpulan

Legitimasi adalah keputusan yang dibuat oleh pemimpin dan pejabat pemerintah atas dasar bahwa pemimpin memperoleh dan menjalankan kekuasaan sesuai dengan nilai-nilai proses publik dan standar politik atau etika. Dengan legitimasi, pemimpin dapat membawa pada stabilitas politik, memfasilitasi perubahan sosial, memperluas ranah kesejahteraan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup yang bermanfaat. Tentunya legitimasi dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sudah terstruktur. Pelaksanaan legitimasi tentu tidak terpungkiri terjadinya problematika-problematika akan tetapi problematika tersebut berusaha diminimalisirkan dengan menggunakan strategi-strategi penyelesaian yang ada. Begitu pula dengan komunikasi kebijakan Pendidikan. Kepentingan komunikasi kebijakan Pendidikan yang mana untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memaknai dan memahami rancangan-rancangan kebijakan Pendidikan tentu tidak semudah yang dibayangkan. Terjadi berbagai problematika dan proses-proses yang harus dilalui. Demikian strategi penyelesaiann pun diupayakan untuk memecahkan problematika yang ada.

#### E. Referensi

- Anwar, K., & Ayudya, R. G. (2015). *Kebijakan Pendidikan di Indonesia (Studi Tentang Upaya Pelaksanaan Kurikulum 2013 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru)*.
- Anwar, M. E. (2014). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 03(Januari), 483–496.
- Ariandy, M. (2019). Kebijakan Kurikulum dan Dinamika Penguatan Pendidikan Karakter di Indonesia. *Sukma: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 137–168. <https://doi.org/10.32533/03201.2019>
- Aziz, A. A., Nurfarida, R., Budiyanti, N., & Zakiah, Q. Y. (2020). Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(2), 192. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i2.2575>
- Fatkuroji. (2016). Implementasi kebijakan pembelajaran terpadu dan minat pelanggan pendidikan. *Jurnaltarbawi*, 2(02), 28–40.

- Hartika, I. (2017). Model Dan Penerapan Komunikasi Organisasi Pendidikan Islam. *HIJRI - Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Keislaman*, 6(1), 111.
- Imron, A. (2012). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Irawan, B. (2014). Faktor-Faktor yang Menjadi Basis Legitimasi dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Transparansi*, Vol. 6(No. 1).
- Kumala, N. D., Setiawan, F., Munauwarah, R., Wulandari, E., & Tramidzi, T. (2021). Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan*, 6(2), 12-19. <https://doi.org/10.47435/jpdk.v6i2.625>
- Madjid, A. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Smk. In A. Cahyanti (Ed.), *Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI)* (Cetakan 1).
- Majid, A. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Penerbit Samudera Biru.
- Mayangsari, I., Dewi, F. A., Nurfadila, & Rivadah, M. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan UU No. 20 Tahun 2003 terhadap Pendidikan Nasional di Indonesia. *Jurnal Soshum Insentif*, 2(2), 98-103.
- Mirzaqon, A. (2018). Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing Library. *Jurnal BK UNESA*, 1, 1-8.
- Nahartyo, E. (2016). Menghindari Krisis Legitimasi : Kebijakan Pendidikan Avoiding Crisis of Legitimacy : Accounting Education Policy From. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*, XIV(2).
- Nani, Y. N. (2021). Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(3), 231. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i3.463>
- Napitupulu, D. S. (2019). Komunikasi Organisasi Pendidikan Islam. *At-Ta'dib: Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam*, 11(2), 127-136.
- Royani, A., Hamid, A., & Ma'arif, M. A. (2019). Problematika Dan Kebijakan Pendidikan Islam Sebuah Telaah Kritis. *Fenomena*, 18(1), 107-124. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v18i1.23>
- Rusdiana, H. . (2021). *Kebijakan Pendidikan*. Pusat Penelitian Dan Penerbitan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Saif. (2017). *Formulasi Kebijakan Pendidikan*. [www.Syaifworld.Blogspot.Com](http://www.Syaifworld.Blogspot.Com).
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148-178.
- Sudrajat, A. (n.d.). *Kepemimpinan dan Masalah Legitimasi dalam Perspektif Islam*.
- Supriadi, A. (2011). Analisis Prakondisi Implementasi Kebijakan Peningkatan Kompetensi Guru. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran (JPP)*, 18(1), 36-46.
- Tawa, A. B. (2019). Kebijakan Pendidikan Nasional Dan Implementasinya Pada Sekolah Dasar. *SAPA-Jurnal Kateketik dan Pastoral*, 4(2), 107-117.
- Wahyuningtyas, R., & Sulasmono, B. S. (2020). Pentingnya Media dalam Pembelajaran Guna Meningkatkan Hasil Belajar di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 23-27. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i1.77>
- Yanti, S. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan. *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 11-26. <https://doi.org/10.32505/lentera.v1i1.1662>
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan*, 30(2), 37-72.